

## Konvergensi simbolik dalam praktik pemolisian prediktif: Studi kasus di Wilayah Kepolisian Sektor Pademangan

### *Symbolic convergence in predictive policing practice: Case study in Pademangan Police Office*

Happy Saputra<sup>1)</sup>, Chandra Wibowo<sup>2)</sup>, Ronald Silalahi<sup>3)\*</sup>, Hilarius Bambang Winarko<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup>Kepolisian Sektor Pademangan

<sup>2)</sup>Program Studi Magister Manajemen, Universitas Bunda Mulia

<sup>3)</sup>Program Studi Bahasa dan Budaya Inggris, Universitas Bunda Mulia

<sup>4)</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bunda Mulia

Naskah Diserahkan 31 Oktober 2022/ Naskah Disetujui 8 Maret 2023

#### **Abstract**

*This research is motivated by social vulnerability in Pademangan District. One form of this vulnerability is mass brawls. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through in-depth interviews, non-participatory observation, document review, both printed and visual. The results show that, in the midst of cramped and squalid spaces in Pademangan District, minor friction and miscommunication can have an impact on vulnerability in the form of criminal acts, conflicts between residents, and social conflicts in the form of brawls. The brawl that occurred in Pademangan Subdistrict can be resolved with a predictive policing practice, a mechanism by carrying out an anatomy crime based on the results of intelligence by the intelligence unit of the Pademangan Police and the results of dialogic patrols. The application of symbolic convergence theory through the fantasy theme of 'zero fights' is able to increase the awareness of citizens, especially vulnerable groups, to avoid fighting.*

**Keywords:** *symbolic convergence, social vulnerability, predictive policing, mass brawls*

#### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerentanan sosial di Kecamatan Pademangan. Salah satu bentuk kerentanan tersebut adalah tawuran antar warga yang terjadi setiap saat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, penelusuran dokumen, baik cetak maupun visual. Hasil penelitian menunjukkan, di tengah sesak dan kumuhnya ruang di Kecamatan Pademangan, gesekan kecil serta miskomunikasi dapat berdampak pada kerawanan yang berupa tindakan kriminal, pertentangan antar warga, serta konflik sosial berupa tawuran. Tawuran yang terjadi Kecamatan Pademangan dapat diselesaikan dengan mekanisme pemolisian prediktif, yakni melakukan prediksi gangguan kamtibmas pada saat menjelang bulan Ramadhan, dengan melakukan *anatomi crime* yang didasarkan oleh hasil pulbaket intelijen oleh unit intelkam Polsek Pademangan dan hasil patroli sambang dan patroli dialogis. Aplikasi teori konvergensi simbolik melalui tema fantasi 'nol tawuran' mampu meningkatkan kesadaran warga, terutama kelompok-kelompok rentan, untuk menghindari tawuran.

**Kata Kunci:** konvergensi simbolik, kerentanan sosial, pemolisian prediktif, tawuran,

#### **Pendahuluan**

Kemiskinan, kepadatan penduduk, kekumuhan, pengangguran, angka kriminalitas yang tinggi, serta konflik sosial adalah sejumlah masalah klasik yang kerap menghampiri kota-kota besar di dunia (Ahmed & Rahaman, 2014; Imai et al., 2017; Murakami et al., 2005). Hal serupa juga ditemui di Jakarta. Salah satunya di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

---

\*Korespondensi penulis:

Email: [rsilalahi@bundamulia.ac.id](mailto:rsilalahi@bundamulia.ac.id)

Masalah kepadatan dan kekumuhan misalnya. Khairunisa, Widyawati, & Nurrokhmah (2017) menyebut, permukiman kumuh dan padat di Kecamatan Pademangan tersebar terutama di sepanjang sungai dan rel kereta, yakni di tanah-tanah negara. Para pemikim di pemukiman kumuh tersebut memanfaatkan tanah marjinal yang dimiliki oleh negara mudah dikuasai dan dikembangkan sebagai lokasi bermukim walaupun dengan utilitas yang sangat terbatas. Penyebab munculnya pemukiman kumuh dan padat tersebut, salah satunya disebabkan oleh struktur dan distribusi kependudukan di Jakarta Utara pada umumnya dan Kecamatan Pademangan pada khususnya yang sangat rapat (Awali dkk, 2019).

Kecamatan Pademangan merupakan salah satu kecamatan di Jakarta Utara yang menjadi lokasi kerawanan sosial. Di Jakarta Utara sendiri terdapat 30 titik kawasan rawan yang tersebar di 6 Kecamatan dan 17 Kelurahan. Penyebab kerawanan tersebut antara lain: kawasan rawan narkoba, adanya kasus kejahatan narkoba, kriminalitas dan kekerasan, keberadaa bandar/pengedar, pengguna narkoba, barang bukti narkoba, sebagai entry point, dan kurir narkoba, banyak lokasi hiburan, tingginya angka kemiskinan dan rendahnya interaksi masyarakat (Purnamasari & Nuryati, 2022). Sabiq & Nurwati (2021) mengemukakan, kepadatan penduduk memberi pengaruh signifikan terhadap tindakan kejadian konflik dan tindakan kriminal karena keterbatasan sumber-sumber pokok dan lapangan pekerjaan, menghambat proses peningkatan kualitas masyarakat dan persaingan antar penduduk.

Hal tersebut sejalan dengan hasil pemetaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)/BKBP Jakarta (2015) yang menyebut adanya 16 kecamatan di Jakarta yang menjadi daerah rawan. Kecamatan tersebut antara lain: Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Tebet, Kecamatan Mampang Prapatan, dan Kecamatan Setia Budi di Jakarta Selatan; Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Matraman di Jakarta Timur; Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Cengkareng, dan Kecamatan Tabora di Jakarta Barat; Kecamatan Johar Baru dan Kecamatan Gambir di Jakarta Pusat; Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Koja, dan Kecamatan Cilincing di Jakarta Utara. Penyebab kerawanan konflik tersebut antara lain kemiskinan, kepadatan penduduk, tindak pidana, kekumuhan, dan tawuran (BKPB Jakarta 2015).

Berdasarkan sigi Kesbangpol Jakarta (BKBP Jakarta, 2015) (Tabel 1), mengacu pada hasil indeks perhitungan rumah tangga miskin, kelurahan Ancol menempati urutan tertinggi dengan indeks 88.09, untuk urutan yang paling rendah ada di kelurahan Pademangan Timur dengan indeks 24.43, sedangkan untuk tingkat kepadatan penduduk, kelurahan Pademangan Barat menempati posisi tertinggi dengan indeks 49.30, kelurahan Ancol yang paling rendah dengan indeks 12.94, kemungkinan penyebabnya adalah sebagian besar merupakan wilayah pariwisata Ancol. Untuk wilayah dengan tingkat kekumuhan tertinggi berada di wilayah Ancol dengan indeks 74.78 dan yang paling rendah ada di kelurahan Pademangan Timur dengan indeks 14.62.

Indeks tindak pidana yang paling tinggi berada di kelurahan Ancol dengan indeks 100.00 didominasi oleh tindak pencurian dan kekerasan, yang paling rendah berada di kelurahan Pademangan Timur dengan indeks 42.18. Indeks tawuran yang paling tinggi untuk wilayah kecamatan ini berada di kelurahan Ancol dengan indeks 100.00, paling rendah berada di kelurahan Pademangan Timur dengan indeks 0.21. Berdasarkan perhitungan secara total untuk indeks kerawanan konflik di Kecamatan Pademangan, kelurahan Ancol menempati posisi tertinggi dengan indeks 74.77 dan yang paling rendah indeks kerawanan konfliknya adalah kelurahan Pademangan Timur dengan indeks 22.50, hal ini disebabkan rendahnya rumah tangga miskin dan tingkat kekumuhan yang rendah di wilayah tersebut.

**Tabel 1. Indeks Kerawanan Konflik di Kecamatan Pademangan Berdasarkan Faktor Pembentuk**

Kecamatan	Indeks Rumah Tangga Miskin	Indeks Kepadatan Penduduk	Indeks RW Kumbuh	Indeks Tindak Pidana	Indeks Tawaran	Indeks Kerawanan Konflik
Pademangan Barat	55.22	49.30	18.33	93.84	2.36	43.81
Pademangan Timur	24.43	31.07	14.62	42.18	0.21	22.50
Ancol	88.09	12.94	74.78	100	98.03	74.77

Sumber: BKBP Jakarta, 2015.

Ruang kota yang serba sempit dan terbatas dapat memunculkan potensi konflik. Menurut Sumandiyar dkk (2020), dari perspektif ruang, adanya fenomena kontestasi, negosiasi, konsensus, dan konflik di perkotaan dapat dipahami sebagai bentuk relasi kuasa dari aktor-aktor penataan ruang yang meliputi pemerintah, masyarakat, dan pasar. Lebih lanjut menurut Sumandiyar, proses megapolitanisasi tersebut bermuara pada konflik kepentingan yang sangat luas, mulai dari konflik antar ruang sampai konflik antar kelompok dan golongan. Berdasarkan tipologi tersebut, Tadjoeidin (2002) menyebut konflik yang sering terjadi di perkotaan termasuk dalam kategori kekerasan kolektif (*collective violence*) dengan sub-kategori *civil commotion*/tawuran, yakni bentrokan antar kampung, warga, atau kelompok.

Penyelesaian konflik sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara. resolusi konflik yang terjadi seputar problem ini dapat diatasi dengan dialog secara inklusif antar elemen masyarakat. Temuan interaksi yang proporsional dan tepat akan mengarahkan publik perkotaan pada bilik kesepahaman kordial dan harmonisasi sosial (Pangestu, 2021). Selain itu, ketidaksepahaman yang berujung pada konflik dapat diselesaikan secara jalur litigasi dan jalur non litigasi berupa mediasi konsolidasi antara warga dan pemerintah (Yamani, 2022). Model resolusi konflik lainnya dan menjadi ciri khas untuk resolusi konflik wilayah perkotaan dapat dilakukan dengan dua pendekatan: (1) preventif; mengarah pada pendekatan persuasif dengan melakukan patroli Kantibmas, penempatan pos polisi, melakukan kegiatan baik itu sosialisasi ataupun bakti sosial, dan (2) pendekatan represif; mengarah pada tindakan penegakan hukum jikalau pendekatan preventif tidak diindahkan oleh pihak yang berkonflik (Abdulhalil, 2019).

Di level kecamatan seperti yang menjadi fokus dalam penelitian ini, peran camat sangat diperlukan untuk menangani konflik (Kinseng 2008). Hal tersebut dengan merujuk pada UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 126 ayat (3) huruf b menyatakan bahwa camat juga bertugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam kasus konflik di perkotaan, mitigasi dilakukan dengan berbagai cara. Baik melalui mediasi maupun penyelesaian melalui jalur hukum bagi pelaku konflik yang terindikasi melakukan tindak pidana. Pelibatan masyarakat secara aktif juga menjadi salah satu upaya mitigasi konflik tersebut. Wadah partisipasi masyarakat melalui forum warga misalnya, adalah gagasan yang mengemuka ketika upaya mitigasi konflik melalui jalur formal-legal menemui jalan buntu.

Pembentukan forum warga ini ternyata sukses meredam potensi konflik, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Johar Baru (Sumarno (2014). Begitu juga dengan pelibatan aktor dan organisasi lokal/akar rumput sebagai mediator vested interest, dapat membuat perdamaian menjadi lebih terjaga (Isnaini, 2020a).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana aparat penegak hukum, yakni kepolisian melakukan praktik pemolisian untuk menyelesaikan konflik sosial berupa tawuran di Kecamatan Pademangan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal eksploratoris (Yin 2012). Menurut Stake (2009), kasus dicermati secara mendalam, konteksnya dikaji secara menyeluruh, dan aktivitas kesehariannya diperinci. Dengan kata lain, pada studi kasus, peneliti bermaksud untuk menunjukkan sesuatu yang khas yang dapat dipelajari dari suatu kasus, yang berbeda dari penjelasan yang diperoleh dari obyek-obyek lainnya.

Creswell (2015) menyatakan, pada penelitian yang menggunakan studi kasus, pengumpulan informasi (data) bentuknya beragam, mulai dari dokumen dan rekaman, wawancara, artefak fisik, dan pengamatan. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran dokumen, baik cetak maupun visual. Data-data tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk narasi, sebagaimana menjadi ciri khas penelitian kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

### Potensi Kerawanan dan Wilayah Rawan di Kecamatan Pademangan

Data BPS Jakarta Utara (2021) menggambarkan secara detil bagaimana kondisi Kecamatan Pademangan (Tabel 2). Dengan luas wilayah hanya 11,92 KM<sup>2</sup>, menjadikan Pademangan sebagai kecamatan terkecil dari enam kecamatan di Jakarta Utara, dengan persentase 8.13%. Namun, wilayah kecil tersebut dihuni oleh 168.265 penduduk sehingga sangat padat. Hal ini dibuktikan dengan pengamatan lapangan yang menunjukkan bahwa daerah Pademangan yang terdiri dari sektor 1 sampai 9, merupakan daerah yang padat.

**Tabel 2. Jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Pademangan**

Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (per KM <sup>2</sup> )
Pademangan Barat	84.421	23.891, 61
Pademangan Timur	45.820	17.539, 43
Ancol	38.024	10.078, 46
Kecamatan Pademangan	168.265	16 964,42

Sumber: BPS Jakarta Utara, 2021

Dengan proporsi per KM<sup>2</sup> dihuni oleh 16.964,42 jiwa, maka Kecamatan Pademangan sangatlah padat dengan penduduk. Menjadi pemandangan yang kasat mata jika melihat rumah-rumah penduduk berjejalan di gang-gang sempit, tanpa menyisakan ruang bagi warga untuk berinteraksi. Selain padat, Kecamatan Pademangan juga memiliki lokasi pemukiman kumuh yang terbilang tinggi di Jakarta Utara (Tabel 3). Peneliti menyaksikan sendiri betapa di gang-gang sempit di Kecamatan Pademangan, rumah antar warga nyaris tidak berjarak. Ruang yang tersisa dimanfaatkan untuk tempat jemur atau gerai usaha. Motor-motor milik warga terparkir di luar, memadati jalan utama ataupun di lahan kosong. Hal ini disebabkan rumah warga yang sempit tidak lagi mampu menampung motor. Penyebab lain adalah karena sempitnya gang tersebut, sehingga motor tidak dapat lewat.

**Tabel 3. Pemukiman kumuh di Kecamatan Pademangan**

Kelurahan	Jumlah Lokasi	Jumlah Bangunan	Jumlah Keluarga
Pademangan Barat	12	623	2064
Pademangan Timur	9	346	682
Ancol	2	654	2480
Kecamatan Pademangan	23	1623	5226

Sumber: BPS Jakarta Utara, 2021

Maka, di tengah sesak dan kumuhnya ruang di Kecamatan Pademangan, gesekan kecil serta miskomunikasi dapat berdampak pada kerawanan yang berupa tindakan kriminal, pertentangan antar warga, serta konflik sosial yang lebih besar. Penelusuran peneliti menemukan, satu hal yang menjadi permasalahan klasik di Pademangan adalah terjadinya tindak tawuran yang sudah berlangsung cukup lama. Selain itu, tindakan kriminal lain yang kerap menyertai tawuran adalah pencurian kendaraan bermotor, pencurian barang elektronik, utamanya telepon genggam, begal, sampai narkoba. Laporan BPS (2014) menunjukkan, Kecamatan Pademangan merupakan satu diantara tiga kecamatan di Jakarta Utara (Selain Penjaringan dan Koja) yang dinyatakan sebagai wilayah rawan narkoba.

Bentuk perkelahian lain, yang ada dalam lingkungan masyarakat Pademangan yakni, masih kerap terjadinya perkelahian antar anak sekolah. Penelusuran penelitian menunjukkan, perkelahian antar siswa, dipicu oleh terjadinya tindakan saling ejek dan merendahkan sekolah, tempat mereka mengenyam pendidikan.

Wilayah yang sempit ditambah banyaknya jumlah penduduk menyisakan sedikit ruang interaksi bagi warga. Meskipun relasi yang dibangun antar warga cair dan konstruktif, namun hal tersebut belum cukup membantu untuk mengurangi tingkat kerawanan di kecamatan Pademangan. Ekonomi yang bertumpu pada sektor informal menjadikan kemiskinan di wilayah tersebut cenderung persisten. Pada akhirnya, faktor-faktor tersebut mencetuskan kerawanan sosial dalam dua manifestasinya: penyalahgunaan narkoba, dan konflik (tawuran) antar warga/kelompok.

Penyalahgunaan narkoba karena kemiskinan adalah faktor struktural konflik. Begitu juga tekanan hidup yang membuat orang menjadi mudah tersulut emosi. Tetapi, desas-desus tentang siapa yang memakai narkoba, siapa yang melakukan tindakan kriminal, apakah dari kelompok 'kami' atau kelompok lain, justru menjadi penyebab yang sifatnya non-struktural dari tawuran. Hal yang sama juga jika terjadi mis-komunikasi mengenai siapa yang memakai narkoba atau siapa yang melakukan kriminal. Meskipun demikian, penyebab non struktural tersebut tidak hanya terjadi pada kasus penyalahgunaan narkoba dan kriminal saja. Dalam banyak kasus tawuran, hal-hal sepele justru yang menjadi pemicu, misalnya saling ejek di pengkolan jalan atau karena 'menggoda' perempuan dari kelompok lawan. Penyebab non-struktural inilah yang menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik, di samping mereduksi penyebab struktural.

Tingginya kerawanan di Kecamatan Pademangan bersesuaian data BPS (2014) tentang Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS). Dari indeks IPKS tersebut, dapat diketahui bahwa di Kelurahan Pademangan Barat, indeks kerawanan modal sosial (modal sosial) tertinggi dibandingkan indeks-indeks lain di IPKS dan di Kelurahan Ancol, mempunyai indeks rawan ekonomi, kemiskinan, dan keamanan tertinggi dibandingkan indeks-indeks lain. Kesamaan dari tiga kelurahan di Kecamatan Pademangan menunjukkan bahwa IPKS mereka sangat dipengaruhi oleh kerawanan modal sosial dan kerawanan ekonomi. Indeks rawan modal sosial dipengaruhi oleh 4 indeks yaitu ketidakberadaan tempat ibadah, ketidakberadaan kegiatan kerja bakti, ketidakberadaan kegiatan arisan dan ketidakberadaan kegiatan binsos (PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, Kebaktian). Dari ketiga kelurahan di Kecamatan Pademangan, sangat minim terhadap empat indeks pembentuk modal sosial, yakni minim tempat ibadah, minim kegiatan kerja bakti, minim kegiatan arisan dan minim kegiatan Binsos (BPS Jakarta 2014).

Begitu juga dengan indeks rawan keamanan dan ketertiban. Menurut BPS Jakarta (2014) indeks rawan keamanan dan ketertiban dibangun dari tiga unsur pembentuk indeks yaitu ketidakberadaan petugas keamanan, tindak pidana, dan tawuran. Berdasarkan data indeks rawan keamanan dan ketertiban, Kelurahan Kampung Rawa dan Kelurahan Galur berada pada posisi rawan sedang, sementara Kelurahan Tanah Tinggi di posisi rawan ringan. Kerawanan sosial yang salah satu manifestasinya berupa konflik antar kelompok/warga ini menguatkan temuan Sujarwoto (2017) yang menemukan bahwa sengketa/konflik komunal berhubungan kuat dengan sejumlah faktor, antara lain kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Dengan kondisi demikian, maka akan mudah sekali menemukan wilayah rawan di Kecamatan Pademangan. Pemetaan Kepolisian Sektor Pademangan (2022) menunjukkan, terdapat 3 wilayah yang menjadi pusat tawuran (Tabel 4):

**Tabel 4. Wilayah Rawan Tawuran di Kecamatan Pademangan**

No.	Wilayah	Lokasi	Rivalitas
1	Utara (Sepanjang Jln. RE. Martadinata)	Bintang Mas	Geng motor vs anak Pasar Nalo
		Depan Pasar Nalo RW 12	Geng Motor vs anak Pasar Nalo
		Jembatan Goyang	
		Kolong Tol Carnaval	
		Flyover samping Benyamin Sueb	
2	Tengah (Sepanjang Jln. Gunung Sahari)	Jln. Trembesi	
		Terowongan RW 13	Anak geng motor vs anak Pasar Nalo
		Jl.Budi Mulia depan pom bensin Budi Mulia	Anak gang 4 vs Tawakal
		Rajawali Kalimati	Anak RW 003 vs anak RW 006
		Depan Maspion	Geng motor
3	Barat	Depan alexis	anak kebon sayur versus Kampung Bandan
		Depan Masjid Kramat, Lodan Raya	Anak geng motor vs kampung bandan
		Jl.Tongkol (perbatasan Pademangan dan Penjaringan)	
		Jln. Mangga Dua Raya	

Sumber : Olahan Peneliti. 2023

Tawuran di ketiga wilayah tersebut (Utara, Tengah, dan Barat) sering terjadi khususnya pada saat akhir pekan dan meningkat pada saat bulan Ramadhan (saat sahur, subuh, selesai tarawih). Selain itu perkembangan media sosial yang pesat juga menjadi katalis bagi kalangan remaja untuk melakukan tawuran. Misalnya, di mulai dari saling ejek di media sosial, kemudian berujung pada tawuran di lapangan.

#### **Konvergensi Simbolik dalam Pencegahan Tawuran**

Sebagaimana dikemukakan Kapolri Jenderal (Pol). Listyo Sigit Prabowo (2021), kejahatan tidak bersifat acak (random) tetapi terjadi dalam pola-pola (patterns) tertentu. Karena itulah, diperlukan sebuah pendekatan khas untuk memahami tindakan pidana yang berpola tersebut. Hal tersebut dikenal sebagai pendekatan pemolisian prediktif. Tujuan dari pemolisian prediktif adalah untuk mengekstraksi berbagai pola kejahatan berdasarkan data historis yang bersifat makro maupun mikro untuk basis prediksi dalam pencegahan dan penanganan di masa mendatang (Brantingham et al, 2011 dalam Prabowo, 2021).

Tawuran yang terjadi di Kecamatan Pademangan juga dapat diselesaikan dengan mekanisme pemolisian prediktif. Hal yang dilakukan Kepolisian Sektor Pademangan adalah melakukan prediksi gangguan kamtibmas pada saat menjelang bulan Ramadhan, dengan

melakukan *anatomi crime* yang didasarkan oleh hasil pulbaket intelijen oleh unit intelkam Polsek Pademangan dan hasil patroli sambang dan patroli dialogis oleh kapolsek pademangan dengan perangkat pemerintah Kecamatan Pademangan, *stakeholder* seperti Pokdarkamtibmas, Linmas, dawis, perangkat RW / RT. Hal ini dilakukan untuk memetakan dimana wilayah yang rawan tawuran dan juga untuk memformulasikan intervensi pencegahan yang efektif dan efisien. Selain itu hal ini juga dilakukan untuk juga mengukur tingkat gangguan keamanan dan ketertiban sehingga kejahatan dicegah sedini mungkin.



Gambar 1. Koordinasi Polsek Pademangan dengan Kelompok Masyarakat Pademangan 1



Gambar 2. Koordinasi Polsek Pademangan dengan Kelompok Masyarakat Pademangan 2

Pada dasarnya masyarakat memberi dukungan dengan langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian untuk mengakhiri tradisi tawuran terutama yang selalu terjadi di bulan puasa. Oleh karena itu, langkah preventif dan preemtif yang diambil mendapatkan dukungan secara mutlak dari masyarakat. Hal ini diperkuat oleh temuan konten episode 1 hingga 16 kanal Youtube Polsek Kecamatan Pademangan.

Dapat dilihat di episode satu misalnya, dipaparkan mengenai penyebab tawuran tertinggi yang ternyata “mengikuti *trend*”, kemudian bagaimana tindakan preventif dilakukan patroli pada jam-jam tertentu dan preemtif dengan mem-*blast* berita serta kerjasama Polisi dengan Pokdar dan Ketua RW dalam bentuk Posko Siskamling (Pospam Pencegahan). Kemudian, pada episode 2 hingga 6 digambarkan bagaimana Polisi Sektor Pademangan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendeteksi dini dan mencegah tawuran. Selanjutnya, di episode 7 hingga 9 dijelaskan peran polisi dalam mengidentifikasi para aktor yang terlibat dalam tawuran serta bertemu langsung dengan mereka. Serial implementasi strategi pencegahan tawuran di di kanal Youtube tersebut pada

episode terakhir (episode 16) ditutup dengan sosialisasi Program Pos GAHRAN di RW 10 serta testimoni dari tokoh masyarakat (RW 4, RW 10, RT 18/RW 01, Karang Taruna) tentang keefektifan program nol tawuran selama Ramadhan & keamanan ibadah di sekitar Masjid Al Mukhlisin.

Rantai retorik dan tema fantasi ‘nol tawuran’ tersebut sejalan dengan penelitian Isnaini (2020b) yang menemukan bahwa tema fantasi sebagai narasi adalah sebuah realitas simbolik. Retorika dibentuk oleh visi retorik setiap agen dan dibagikan kepada anggota kelompok serta komunitas sekitar. Visi retorik tersebut menawarkan tema fantasi sebagai modal sosial yang dipandang oleh kelompok sebagai nilai dan keyakinan fundamental.

Sebagaimana analisis atas isi konten Youtube Kepolisian Sektor Pademangan, maka polisi dapat dikatakan memiliki peran sebagai mediator hubungan sosial. Artinya, aparat keamanan dapat menggunakan pengaruh, wibawanya guna menekan para pihak untuk mendorong para pihak agar menghasilkan kesepakatan (Moore 2004). Dalam hal ini, polisi dapat bertindak: 1) Mengedepankan upaya pencegahan (preventif & preemtif) dibandingkan penangkapan, dengan pengawasan terpadu yang melibatkan berbagai elemen masyarakat; 2) Melakukan kerjasama Polsek Pademangan dalam melakukan pengawasan dengan berbagai elemen, yaitu: Lurah, Babinsa, FKOM, RW/RT, LMK, Relawan Ibu-Ibu Dawis, Linmas, Pokdar Kamtibmas, dan Karang Taruna; 3) Sosialisasi sanksi hukum kepada para pelaku tawuran anak dan pencurian, serta orang tua (berupa pengiriman ke Panti Anak-Anak Nakal/Dinas Sosial sampai dengan Lapas Anak); 4) Membangun sistem *database* untuk memantau kelompok-kelompok dan daerah rawan kekerasan dan tawuran, melalui Posko Gahrn, *Cyber Patrol*, dan Patroli Sepeda Motor; 5) Saluran komunikasi dilakukan melalui berbagai media digital, mulai dari: *Zoom meeting*, *Handy Talkie*, dan *WhatsApp Group*; 6) Pemasangan spanduk *banners* di titik-titik rawan sebagai kegiatan komunikasi publik sekaligus upaya preemtif; 7) Menggunakan *media press release* untuk melakukan berbagai himbauan preemtif dan deklarasi dari kelompok-kelompok anak yang teridentifikasi pernah melakukan tawuran; 8) Menggunakan influencers dari kalangan anak muda (Lord Dustin & kelompok Bestie) dan testimoni dari tokoh-tokoh masyarakat untuk mendukung sistem pencegahan tawuran (sisgahrn); 9). Menyarankan pentingnya keterlibatan setiap warga serta kehadiran anggota kepolisian dalam suatu konsep pengawasan bersama (simbiose mutualisme).

## Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan secara holistik bahwa proses komunikasi yang dibangun oleh polsek Pademangan sebagai suatu mekanisme pemantau dan pencegahan berdampak positif terhadap turunnya angka kriminalitas secara umum yang terkait dengan tawuran. Pada tataran berikutnya mekanisme dan model kepemimpinan partisipatif yang berorientasi pada penguatan agen-agen yang dalam hal ini diwakili oleh masyarakat menjadi solusi yang tepat dan dapat diimplementasikan dalam konteks sosial dan budaya yang lebih besar. Nilai-nilai budaya gotong-royong yang merupakan mentalitas bangsa Indonesia merupakan landasan penerapannya bahkan dalam konteks nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan preventif dan preemtif di lingkungan polsek pademangan dapat diterapkan secara meluas di seluruh Indonesia.

## Referensi

- Abdulhalil, B. A. K. S. (2019). Resolusi Konflik dalam Ranah Lokal (Studi Tentang Strategi Brimob Maluku Utara dalam Penanggulangan Perkelahian Antar Kampung Kelurahan Toboko dan Mangga Dua). *Ejournal KAWASA*, 9(2), 19-32.
- Ahmed, S., & Rahaman, K. R. (2014). Sustainability challenges and the spatial manifestation of poverty in megacities of the Global South: Focus on Dhaka,

- Bangladesh. In *From sustainable to resilient cities: Global concerns and urban efforts*. Emerald Group Publishing Limited.
- Awali, M. N., Oktaviyani, A., Tallo, A. J., & Deyanara, E. (2019, February). Struktur Dan Distribusi Kependudukan Kota Administratif Jakarta Utara Tahun 2012-2016. In *Seminar Nasional Geomatika* (Vol. 3, No. 583, pp. 2018-3).
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 2015. *Peta Kawasan Rawan Konflik DKI Jakarta*. Jakarta: Badan Kesatuan Politik dan Bangsa DKI Jakarta
- BPS Jakarta Badan Pusat Statistik Jakarta. 2014. *Indeks Potensi Kerawanan Sosial 2014*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik DKI Jakarta
- BPS Jakarta Utara. *Kecamatan Pademangan dalam Angka 2021*. Jakarta: BPS Jakarta Utara
- Creswell JW. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar
- Imai, K. S., Gaiha, R., & Garbero, A. (2017). Poverty reduction during the rural–urban transformation: Rural development is still more important than urbanisation. *Journal of Policy Modeling*, 39(6), 963-982.
- Isnaini, M., Marta, R., Daniar, A., Nurdiana, N., & Prananingrum, N. (2020b, November). Friends or Foes? Fantasy Themes and Social Identity Theory in Intergroup Conflicts. In *The Proceedings of the 4th International Conference of Social Science and Education, ICSSSED 2020, August 4-5 2020, Yogyakarta, Indonesia*.
- Isnaini, M., Sarwoprasodjo, S., Kinseng, R. A., & Kholil, K. (2020a). Praktik vigilantisme digital di media sosial dalam konflik antarkelompok. *Jurnal Studi Komunikasi*, 4(3), 749-767
- Khairunisa, A. H., Widyawati, W., & Nurrokhmah, R. (2017). Pola Persebaran Permukiman Kumuh di Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 7(1), 139-149.
- Malik I. 2017. *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta (ID): Penerbit Buku Kompas
- Moore C.W. 2004. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco (US): Jossey-Bass
- Murakami, A., Zain, A. M., Takeuchi, K., Tsunekawa, A., & Yokota, S. (2005). Trends in urbanization and patterns of land use in the Asian mega cities Jakarta, Bangkok, and Metro Manila. *Landscape and Urban Planning*, 70(3-4), 251-259.
- Pangestu, P. P. (2021). Harmonisasi Sosial Perkotaan: Telaah Probabilitas Konflik Pada Tradisi Bangun Sahur Atas Regulasi Pengeras Suara Masjid. *Jurnal Penelitian*, 15(1), 149-168.
- Prabowo, Listyo Sigit. 2021. *Pemolisian Prediktif*. Dokumen pada Dengar Pendapat dengan DPR
- Purnamasari, N., & Nuryati, T. (2022). Evaluasi Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat di Wilayah Jakarta Utara. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(2), 66-72.
- Sabiq, R. M., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh kepadatan penduduk terhadap tindakan kriminal. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 161-167.
- Stake RE. 2009. Studi Kasus. Dariyatno dkk, penerjemah. Di dalam Denzin NK, Lincoln YS. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar. hlm:299-313
- Sumandiyar, A., Syarif, S., Arda, M. S., & Nur, H. (2020). Sosiologi Perkotaan: Kapitalisasi Ruang dan Marjinalisasi Sosial. Kendari: Literacy Institut
- Sumarno, S., 2014. Problema dan resolusi konflik sosial di kecamatan johar baru - jakarta pusat. *Sosio Konsepsia*, 3(2), pp. 1–16

- Tadjoeddin, Mohammad Zulfan. 2002. *Anatomy of Social Violence in The Context of Transition: The Case of Indonesia, 1990-2001*. Politics Administration and Change, No. 38, July-December 2002
- Yamani, U. K. (2022). Konflik Pembangunan Rumah Deret Tamansari Kota Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2).
- Yin RK.2012.*Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta (ID):Rajawali Pers
- Youtube Polsek Pademangan. Diakses pada tanggal 26 Mei 2022 di laman:  
<https://www.youtube.com/channel/UCqvtfoXEp67m-MQyznZggpQ>